



© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan artikel atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

**Tia Anis Dhakhiyah      H34080140 /2008**

**Lutfiah Nur                      H34080089 / 2008**

**Akmi Retno Dwipa      H44090037 / 2009**



## LEMBAR PENGESAHAN

1. Judul Kegiatan : Optimalisasi Diversifikasi Pangan Berbasis Kearifan Lokal melalui Peran Pemerintah Daerah sebagai Kompensasi atas Peningkatan Kesejahteraan Petani dengan Mengurangi Penekanan Harga Eceran Tertinggi Beras
2. Bidang Kegiatan : (...)PKM-AI (X) PKM-GT
3. Ketua Pelaksana Kegiatan
  - a. Nama Lengkap : Tia Anis Dhakhiyah
  - b. NIM : H34080140
  - c. Jurusan : Agribisnis
  - d. Universitas/Institut/Politeknik : Institut Pertanian Bogor
  - e. Alamat Rumah dan No Tel./HP : Cipeucang 17, Cileungsi-Bogor/  
0857 1669 8340
  - f. Alamat *email* : [tyapoenyemail@yahoo.co.id](mailto:tyapoenyemail@yahoo.co.id)
4. Anggota Pelaksana Kegiatan/Penulis : 2 (Dua) orang
5. Dosen Pendamping
  - a. Nama Lengkap dan Gelar : Arif Karyadi Uswandi, SP.
  - b. N I P : 132 310 810
  - c. Alamat Rumah dan No Tel./HP : Jl. Kaum Sari No. 48 RT 3/RW 5  
Cibuluh Bogor Utara 16710  
HP 0859 2515 1043

Bogor, 7 Maret 2011

Menyetujui,

Ketua Departemen Agribisnis

Ketua Pelaksana Kegiatan

(Dr. Ir. Nunung Kusnadi, MS)  
NIP. 131 415 082

(Tia Anis Dhakhiyah)  
NIM. H34080140

Wakil Rektor  
Bidang Akademik dan Kemahasiswaan IPB

Dosen Pendamping

(Prof. Dr. Ir. Yonny Koesmaryono, MS)  
NIP. 19581228 198503 1 003

(Arif Karyadi Uswandi, SP)  
NIP. 132 310 810



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini sebagaimana mestinya.

Melonjaknya harga beras dari tahun ke tahun mendesak pemerintah untuk mengimpor beras asing terutama dari Thailand dan Vietnam untuk menjaga stabilisasi harga pangan mengingat beras merupakan komoditas yang sangat strategis bagi masyarakat Indonesia. Kurangnya ketersediaan pasokan beras domestik Indonesia banyak dinilai karena infrastruktur yang buruk sehingga distribusi terhambat, penurunan produksi dan produktivitas petani karena isu konversi lahan ke arah non pertanian dan sebagainya. Namun yang sebenarnya terjadi tidak demikian jika kita merujuk pada fakta yang ada.

Hingga tahun 2010 produksi dan produktivitas padi nasional terus meningkat. Perkembangan infrastruktur pun hingga tahun 2008 semakin membaik. Demikian pula dengan beberapa penelitian mengenai daya saing padi setelah adanya konversi lahan yang menyimpulkan bahwa padi kita masih dapat terus bersaing meskipun konversi lahan terus meningkat. Lalu mengapa suplai beras nasional kita tidak dapat memenuhi permintaan dalam negeri, sehingga ketidakmandirian pangan Indonesia memudahkan impor beras asing? Mengapa pula pemerintah daerah masih belum mampu mengatasi kesulitan aksesibilitas pangan baik secara fisik maupun ekonomi terhadap daerahnya mengetahui sistem pemerintahan daerah ini terdesentralisasi? Mekanisme pasar yang dijalankan pemerintah saat ini tidak layak untuk dipertahankan sejak ditandatanganinya perjanjian pasar bebas *AFTA* dengan *World Trade Organization*. Oleh karena itu, sudah saatnya generasi ini mulai menyesuaikan perkembangan lingkungan bisnis dan ekonomi yang telah disepakati.

Penulis sepenuhnya menyadari, bahwa masih ada banyak kekurangan dan jauh dari kata kesempurnaan. Untuk itulah segala bentuk masukan, baik berupa kritik maupun saran, sangat penulis harapkan agar dapat menjadi bahan pembelajaran demi mencapai kesempurnaan pada karya selanjutnya. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan khususnya bagi penulis pribadi dalam rangka pengembangan diri.

Bogor, 18 Februari 2011

Penulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan literatur atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iv
<b>RINGKASAN</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1.Latar Belakang Masalah .....	1
1.2.Tujuan dan Manfaat Penulisan .....	2
<b>BAB II PEMBAHASAN DAN HASIL GAGASAN</b>	
2.1.Pembahasan dan Gagasan .....	2
<b>BAB III KESIMPULAN</b> .....	8
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	9
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	10

## DAFTAR TABEL

2.1.1. Panjang Jalan Dirinci Menurut Jenis Permukaan tahun 1987-2008 (Km) .....	3
2.1.2. Panjang Jalan Dirinci Menurut Tingkat Kewenangan tahun 1987-2008 (Km) .....	4
2.1.3. Luas, Produktivitas dan Produksi Padi Indonesia tahun 2000-2011 .....	5
2.1.4. Realisasi Penerimaan Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Menurut Jenis Penerimaan tahun 2005-2008 (Ribu Rupiah) .....	6

## RINGKASAN

Masuknya beras impor asing ke Indonesia akibat kurangnya ketersediaan beras di beberapa daerah tertentu membuat pemerintah bertindak untuk mengimpor beras. Keputusan pemerintah mengimpor beras ini dalam rangka stabilisasi harga pangan dalam negeri akibat melonjaknya harga beras. Beras merupakan komoditas pangan yang paling penting di Indonesia. Apabila harga pangan strategis ini meningkat tinggi akan memicu tingginya inflasi seluruh produk pangan. Namun demikian kebijakan mengimpor beras yang dilakukan pemerintah tersebut ini belum berhasil dalam melindungi petani baik sebagai produsen maupun konsumen dan masyarakat secara keseluruhan. Bahkan, harga beras impor ini dibebaskan dari tarif bea masuk sehingga harga beras domestik semakin kalah bersaing dengan beras impor. Hal ini akan memperburuk usahatani padi Indonesia setelah turunnya semangat petani padi Indonesia untuk berinvestasi kembali pada budidaya padi akibat kehilangan insentif dari penerapan kebijakan Harga Eceran Tertinggi beras dan perilaku Bulog yang hanya mau membeli beras petani pada harga yang lebih rendah dari Harga Pokok Pembelian.

Tujuan dari penulisan ini adalah (1) Menguraikan penyebab tindakan pemerintah mengimpor beras, (2) Menguraikan permasalahan yang dihadapi petani beras setelah adanya liberalisasi perdagangan, (3) Menjelaskan perubahan kebijakan perubahan HET beras terhadap peningkatan kesejahteraan petani, (4) Menjelaskan peran pemerintah daerah dalam memberdayakan komoditas berbasis kearifan lokal sebagai kompensasi kepada masyarakat, (5) Memberikan alternatif kebijakan yang menciptakan keuntungan bagi petani padi dan masyarakat dalam rangka mencapai ketahanan pangan nasional dan (6) Memberikan langkah alternatif dalam meningkatkan daya saing dalam tanaman pangan beras Indonesia. Metode penulisan ini adalah, menentukan topik tulisan, mengumpulkan data dan informasi sekunder, merumuskan masalah, menyusun kerangka analisis untuk menganalisis permasalahan, mensintesis permasalahan yang dianalisis, menyimpulkan dan merekomendasikan atas tulisan ini.

Tindakan pemerintah mengimpor beras bukan didominasi oleh masalah produksi dan produktivitas padi nasional yang menurun maupun aksesibilitas secara fisik akibat infrastruktur jalan yang buruk. Produksi dan produktivitas padi nasional terus meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan berkurangnya luasan lahan yang diusahakan akibat perkembangan teknologi budidaya. Demikian juga dengan infrastruktur yang terus membaik terlihat dari semakin berkurangnya panjang jalan yang belum diaspal. Setelah adanya penerapan pasar bebas, petani padi kehilangan insentif baik akibat penurunan bahkan pembebasan tarif impor beras serta penerapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang kurang



berpihak pada petani. Apabila pemerintah menurunkan penekanan terhadap kebijakan dalam penerapan HPP dan HET, maka sebenarnya petani mampu memproduksi padi untuk memenuhi kebutuhan domestik.

Dalam rangka mensejahterakan setiap pelaku ekonomi, termasuk masyarakat didalamnya, maka perubahan kebijakan ini perlu disertai dengan kompensasi melalui pemberdayaan komoditas berbasis kearifan lokal oleh pemerintah daerah. Peran pemerintah daerah efektif untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memberikan kontribusi terbesar untuk pendapatan daerah. Ini adalah langkah untuk menciptakan iklim yang kondusif untuk meningkatkan aksesibilitas secara ekonomi dan meningkatkan daya saing petani padi dalam menghadapi konsekuensi adanya liberalisasi perdagangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan artikel atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

## PENDAHULUAN

### 1.1.Latar Belakang Masalah

Masuknya beras impor asing ke Indonesia akibat kurangnya ketersediaan beras di beberapa daerah tertentu membuat pemerintah bertindak untuk mengimpor beras dari Thailand dan Vietnam sebesar 1,2 juta ton per tahun. Berita dari perum Bulog (Badan Urusan Logistik) yang menginformasikan bahwa stok beras minimum 1.5 juta ton dengan pengadaan prioritas dalam negeri dimana untuk menjamin stok ini tetap cukup, Bulog telah berkomitmen untuk mengimpor sebanyak 1.2 juta ton (Kompas, 22 Desember 2010). Keputusan pemerintah mengimpor beras ini dalam rangka stabilisasi harga pangan dalam negeri akibat melonjaknya harga beras. Beras merupakan komoditas pangan yang paling penting di Indonesia. Apabila harga pangan strategis ini meningkat tinggi akan memicu tingginya inflasi seluruh produk pangan, karena tingginya kebutuhan akan pengeluaran pangan maka masyarakat akan menuntut kenaikan upah secara tidak langsung yang menimbulkan biaya bagi perusahaan dan seluruh harga akan mengalami kenaikan secara bersamaan.

Namun demikian kebijakan mengimpor beras yang dilakukan pemerintah tersebut ini belum berhasil dalam melindungi petani baik sebagai produsen maupun konsumen dan masyarakat secara keseluruhan. Bahkan, harga beras impor ini dibebaskan dari tarif bea masuk sehingga harga beras domestik semakin kalah bersaing dengan beras impor. Hal ini akan memperburuk usahatani padi Indonesia setelah turunnya semangat petani padi Indonesia untuk berinvestasi kembali pada budidaya padi akibat kehilangan insentif dari penerapan kebijakan Harga Eceran Tertinggi beras dan perilaku Bulog yang hanya mau membeli beras petani pada harga yang lebih rendah dari Harga Pokok Pembelian. Padahal produksi dan produktivitas padi nasional meningkat dari tahun ke tahunnya. BPS (2011) menyebutkan melalui data Angka Ramalan 1, produktivitas padi tertinggi pada tahun 2011 yaitu 507,6 ton per ha dengan produksi tertinggi yaitu 67.307.324 ton.

Maka dari itulah tulisan ini dibuat untuk menguraikan permasalahan yang mendasari menurunnya minat petani padi untuk mengusahakan padi yang menyebabkan kurangnya pasokan padi nasional. Salah satunya adalah menjelaskan kebijakan pemerintah mengenai penerapan Harga Eceran Tertinggi dan Harga Pembelian Pokok yang mengurangi insentif petani meskipun harga beras terus meningkat. Kemudian diuraikan bagaimana menanggapi kebijakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani dengan memberikan kompensasi kepada masyarakat melalui pengembangan diversifikasi pangan berbasis kearifan lokal. Tentunya kearifan lokal ini dapat ditunjang melalui peran pemerintah daerah sebagaimana sistem desentralisasi yang telah diberikan. Dengan demikian, pengendalian pemerintah terhadap mekanisme pasar yang berpihak kepada petani menjadi langkah awal untuk memperkuat kemandirian pangan nasional menuju

swasembada beras. Selain itu, kompensasi masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan aksesibilitas baik secara ekonomi maupun fisik dalam penyediaan pangan rumah tangga.

## 1.2. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Tulisan ini dibuat dengan tujuan dan manfaat sebagai berikut;

1. Menguraikan penyebab tindakan pemerintah mengimpor beras
2. Menguraikan permasalahan yang dihadapi petani beras setelah adanya liberalisasi perdagangan
3. Menjelaskan perubahan kebijakan Harga Eceran Tertinggi beras terhadap peningkatan kesejahteraan petani
4. Menjelaskan peran pemerintah daerah dalam memberdayakan komoditas berbasis kearifan lokal sebagai kompensasi kepada masyarakat
5. Memberikan alternatif kebijakan yang menciptakan keuntungan bagi petani padi dan masyarakat dalam rangka mencapai ketahanan pangan nasional
6. Memberikan langkah alternatif dalam meningkatkan daya saing dalam tanaman pangan beras Indonesia

## PEMBAHASAN DAN HASIL GAGASAN

### 2.1. Pembahasan dan Gagasan

Beras impor yang masuk ke Indonesia salah satunya adalah akibat dari kurangnya ketersediaan beras di beberapa daerah tertentu. Pasokan yang rendah tersebut karena aksesibilitas secara fisik oleh masyarakat yang rendah, yaitu sarana dan prasarana distribusi yang tidak efisien. Tabel 2.1.1 menunjukkan bahwa jumlah jalan yang sudah diaspal hingga tahun 2008 semakin besar, sementara jumlah panjang jalan yang belum diaspal lebih sedikit dibandingkan yang belum diaspal secara keseluruhan. Maka distribusi sudah tidak menjadi masalah utama lagi dalam hal aksesibilitas secara fisik, karena berkembangnya infrastruktur jalan sebagai sarana distribusi. Namun bukan berarti pemerintah melepaskan masalah itu, karena pada kenyataannya di beberapa daerah terutama sebagian besar kabupaten dan kota yang kebanyakan merupakan penduduk pedesaan, masih menghadapi kendala dalam mengakses pangan akibat infrastruktur jalan yang belum dibenahi.

Tabel 2.1.2. menunjukkan jumlah jalan yang masih menjadi tanggungjawab pemerintah berada pada sebagian besar wilayah kabupaten dan kota. Masyarakat pedesaan yang sebagian besar bermata pencaharian petani banyak terdapat di wilayah tersebut. Secara tidak langsung, pembangunan infrastruktur jalan masih menjadi salah satu masalah penyebab ketidakmandirian pangan bagi rumah tangga petani.



**Tabel 2.1.1. Panjang Jalan Dirinci Menurut Jenis Permukaan tahun 1987-2008 (Km)**

Tahun	Aspal	Bukan Aspal	Jumlah
1987	99 467	127 877	227 344
1988	111 649	143 285	254 934
1989	121 313	149 862	271 175
1990	130 262	158 465	288 727
1991	142 053	177 317	319 370
1992	150 930	174 511	325 441
1993	159 329	185 563	344 892
1994	164 866	192 012	356 878
1995	171 508	155 719	327 227
1996	180 614	155 763	336 377
1997	192 668	148 799	341 467
1998	168 072	187 291	355 363
1999*)	203 374	152 577	355 951
2000	203 214	152 737	355 951
2001	212 935	148 847	361 782
2002	211 998	156 364	368 362
2003	216 109	154 407	370 516
2004	206 144	166 485	372 629
2005	216 714	174 295	391 009
2006	208 732	185 062	393 794
2007	256 548	164 987	421 535
2008	258 744	179 015	437 759

Sumber : Departemen Pekerjaan Umum Pusat dan Daerah  
 \*) sejak 1999 tidak termasuk Timor-Timur

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan literatur atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

**Tabel 2.1.2. Panjang Jalan Dirinci Menurut Tingkat Kewenangan tahun 1987-2008 (Km)**

Tahun	Negara	Provinsi	Kab/Kota	Jumlah
1987	13 863	40 277	168 784	222 924
1988	14 590	40 299	195 425	250 314
1989	17 185	40 704	208 437	266 326
1990	19 806	38 099	225 611	283 516
1991	21 858	42 504	249 535	313 897
1992	21 858	42 625	255 275	319 758
1993	23 483	46 231	275 178	344 892
1994	26 351	49 693	280 834	356 878
1995	23 857	38 170	265 200	327 227
1996	26 850	39 747	269 780	336 377
1997	27 127	42 205	272 135	341 467
1998	27 977	47 863	279 523	355 363
1999*)	26 206	46 538	283 207	355 951
2000	26 272	46 781	282 898	355 951
2001	26 328	47 877	287 577	361 782
2002	27 616	48 905	291 841	368 362
2003	29 318	48 424	292 774	370 516
2004	34 628	40 125	298 175	372 929
2005	34 628	40 125	316 255	391 009
2006	34 628	40 125	319 041	393 794
2007	34 628	40 125	346 782	421 535
2008	34 628	40 125	363 006	437 759

Sumber : Departemen Pekerjaan Umum Pusat dan Daerah

Catatan : 1987 - 1992 tidak termasuk DKI Jakarta

\*) sejak 1999 tidak termasuk Timor-Timur

Jarak yang jauh untuk mencapai daerah tersebut tidak hanya mengeluarkan tambahan biaya transportasi, namun seringkali terjadi pemungutan biaya transaksi yang tinggi. Maka, beras yang sampai di tangan masyarakat (rumah tangga) akan mempunyai harga jual yang tinggi. Untuk masyarakat yang berpendapatan rendah, sulitnya akses secara fisik ini secara langsung menimbulkan kesulitan aksesibilitas secara ekonomi.

Dengan pendapatan rata-rata yang rendah, beras dengan harga jual yang tinggi yang dapat dibeli berkurang. Karena beras merupakan kebutuhan pokok atau barang normal sehingga penurunan jumlah beras sekalipun yang terjadi tidak akan besar secara signifikan. Melihat kenyataan ini, pemerintah bertindak mengimpor kekurangan pasokan beras yang tidak dapat dipenuhi dalam rumah tangga daerah tersebut. Inilah yang dikatakan bahwa Indonesia masih berada dalam ketidakmandirian pangan. Padahal beberapa fakta potensi Indonesia dalam mencapai swasembada pangan atau kemandirian pangan itu ada untuk memenuhi permintaan domestik, bahkan melakukan ekspor beras. Hal itu dapat dilihat dari produksi dan produktivitas padi dalam negeri yang terus meningkat dari tahun ke tahunnya.

**Tabel 2.1.3. Luas, Produktivitas dan Produksi Komoditas Padi Indonesia tahun 2000-2011**

Tahun	Luasan Panen (ha)	Produktivitas (ku/ha)	Produksi (ton)
2000	11.793.475	44,01	51.898.852
2001	11.499.997	43,88	50.460.782
2002	11.521.166	44,69	51.489.694
2003	11.488.034	45,38	52.137.604
2004	11.922.974	45,36	54.088.468
2005	11.839.060	45,74	54.151.097
2006	11.786.430	46,20	54.454.937
2007	12.147.637	47,05	57.157.435
2008	12.327.425	48,94	60.325.925
2009	12.883.576	49,99	64.398.890
2010*)	13.244.184	50,14	66.411.469
2011**)	13.258.693	50,76	67.307.324

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2011

\*)Data Tahun 2010 menggunakan Angka Sementara

\*\*\*)Data Tahun 2011 menggunakan Angka Ramalan I

Jika berbicara kemandirian pangan yaitu komoditas beras yang memang memiliki proporsi pemenuhan energi yang relatif tinggi terhadap total kecukupan konsumsi pangan masyarakat Indonesia, maka masalah kekurangan akibat adanya pasar gelap mungkin terjadi, sebelum adanya kebijakan tarif impor pemerintah. Tindakan impor yang diambil pemerintah sebelum perjanjian dengan *World Trade Organization (WTO)* memungkinkan masih adanya *black market*. Namun, saat ini dengan adanya liberalisasi perdagangan yaitu pasar bebas, tarif impor diturunkan bahkan hampir dihapuskan demi terpenuhinya kebutuhan pangan pokok Indonesia. Hal inilah yang dapat menjadi salah satu alternatif untuk menjelaskan alasan diimpornya beras asing. Jika tarif impor paling ekstrimnya ditiadakan, maka harga jual produsen akan kalah bersaing selain kehilangan margin. Ini terjadi bukan hanya pada saat terjadi penurunan tarif impor saja, melainkan ketika diterapkannya kebijakan Harga Eceran Tertinggi di tingkat pedagang dan Harga Pokok Pembelian pada saat Bulog membeli gabah petani.

Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan pemerintah dalam rangka melindungi masyarakat, secara tidak langsung membatasi potensi margin yang dimungkinkan dapat diperoleh petani. Akibat harga jual yang kurang menarik itulah yang membuat tidak adanya kompetisi di antara petani untuk berlomba-lomba dalam memproduksi beras. Jika saja pemerintah tidak menekan harga beras tersebut pada harga maksimumnya, dengan sendirinya petani akan bersemangat menanam padi dan bukan tidak mungkin swasembada pangan yang selama ini direduksi pada komoditas beras akan tercapai. Namun, tentunya adanya tindakan ini akan menimbulkan *trade-off* dengan kepentingan konsumen. Sebaliknya, dengan adanya liberalisasi perdagangan itu membuat masyarakat atau rumah tangga memiliki daya beli atau pendapatan riil yang besar akibat harga jual beras impor yang lebih kompetitif.

Sebagai pengambil keputusan, pemerintah dalam mensejahterakan petani dan masyarakat, untuk kebijakan penurunan penekanan harga jual beras petani pada harga maksimum harus memberikan masyarakat kompensasi atas itu apabila tarif impor dinaikkan dalam rangka memproteksi petani pada pangan atau komoditas yang strategis ini. Kompensasi ini sebaiknya ditujukan untuk diversifikasi pangan mengingat kemandirian pangan atau swasembada pangan bukanlah semata-mata dipersempit pada komoditas beras saja. Diversifikasi pangan hendaknya berbasiskan pada komoditas kearifan lokal karena adanya kemudahan dalam anggaran untuk modal pengembangannya melalui pemerintah daerah. Hanya saja sistem otonomi daerah yang telah diterapkan setelah masa Orde Baru ini sebagian besar belum menunjukkan kemandirian lokal dalam ketahanan pangan nasional.

**Tabel 2.1.4. Realisasi Penerimaan Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Menurut Jenis Penerimaan 2005-2008 (Ribu Rupiah)**

Jenis Penerimaan	2005	2006	2007	2008
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>56,907,842,181</b>	<b>69,376,713,186</b>	<b>77,935,427,880</b>	<b>96,698,251,715</b>
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	27,885,722,629	30,556,135,053	35,107,948,811	44,486,733,562
Pajak Daerah	24,208,786,980	25,719,347,146	29,464,063,064	38,042,637,125
Retribusi Daerah	1,344,475,078	1,601,546,853	1,852,446,348	1,894,314,643
Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Lain-lain PAD yang Sah	775,550,046	852,500,283	1,101,338,485	1,300,646,754
Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	24,777,712,234	33,654,398,517	36,513,742,961	42,992,798,385
Dana Alokasi Umum	8,869,816,934	10,280,860,925	12,721,504,646	14,824,628,954
Dana Alokasi Khusus	6,658,425,251	8,782,163,818	6,538,440,791	9,510,681,776
Lain-lain Pendapatan yang Sah	9,223,416,989	14,571,373,774	16,478,797,524	17,951,467,919
	26,053,060	20,000,000	775,000,000	706,019,736
	4,244,407,318	5,166,179,616	6,313,736,108	9,218,719,768
<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>9,302,607,771</b>	<b>14,680,277,690</b>	<b>17,287,901,278</b>	<b>16,638,848,508</b>
<b>JUMLAH</b>	<b>66,210,449,952</b>	<b>84,056,990,876</b>	<b>95,223,329,158</b>	<b>113,337,100,223</b>

\*) Data APBD

Namun melihat data BPS di atas besarnya realisasi penerimaan pemerintah Provinsi seluruh Indonesia yang berasal dari pendapatan daerah dari tahun 2005 hingga tahun 2008 rata-rata kontribusi terbesar adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Secara teoritis besar kecilnya potensi PAD pada suatu daerah dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi daerah yang bersangkutan, terutama pada sektor industri dan jasa. Sebab kedua sektor tersebut merupakan basis PAD yang sangat dominan. Dengan demikian, untuk mengestimasi besarnya PAD dan pertumbuhan PAD setiap tahunnya dapat digunakan asumsi pertumbuhan ekonomi daerah yang digunakan.

Komponen PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD dan lain-lain PAD.

Maka perlu segera untuk dibuat format kebijakan dalam ketahanan pangan secara lokal yang menyesuaikan aturan liberalisasi perdagangan saat ini. Salah satunya adalah dengan mendisain penguasaan dan pengusahaan lahan yang berlandaskan efisiensi skala ekonomi. Hal ini ditujukan untuk memungkinkan proses pengalihan fungsi lahan kepada pengusahaan komoditas yang berbasis kearifan lokal. Maka, penting bagi pemerintah daerah untuk mengidentifikasi dengan memperdalam kelayakan komoditas atau cabang usahatani yang potensial dan kompetitif. Namun, diversifikasi usahatani dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan nasional dengan menyediakan bahan pangan pokok dan pemenuhan energi substitusi tidak dapat dengan mudah dikembangkan tanpa melihat adanya permintaan komoditas itu sendiri.

Apabila komoditas lokal daerah tersebut bersifat barang normal seperti beras maka permintaan dengan mudah tercipta, namun masalahnya adalah pada komoditas lokal yang bersifat barang inferior seperti tiwul dan jagung, maka untuk dapat tetap memperkuat ketahanan pangan nasional, perlu adanya industri pengolahan tanaman pangan untuk menciptakan nilai tambah dari adanya margin produk yang diolah. Margin inilah yang secara tidak langsung dengan menciptakan iklim yang kondusif dalam meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat dalam mengakses kebutuhan pangan. Permintaan inilah yang menjadi syarat kelayakan dalam pemilihan atau pengembangan cabang usahatani yang berbasis keunggulan lokal di samping tingkat margin yang diperoleh tadi.

## KESIMPULAN

Tindakan pemerintah mengimpor beras bukan didominasi oleh masalah produksi dan produktivitas padi nasional yang menurun maupun aksesibilitas secara fisik akibat infrastruktur jalan yang buruk. Produksi dan produktivitas padi nasional terus meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan berkurangnya luasan lahan yang diusahakan akibat perkembangan teknologi budidaya. Demikian juga dengan infrastruktur yang terus membaik terlihat dari semakin berkurangnya panjang jalan yang belum diaspal. Setelah adanya penerapan pasar bebas, petani padi kehilangan insentif baik akibat penurunan bahkan pembebasan tarif impor beras serta penerapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang kurang berpihak pada petani. Apabila pemerintah menurunkan penekanan terhadap kebijakan dalam penerapan HPP dan HET, maka sebenarnya petani mampu memproduksi padi untuk memenuhi kebutuhan domestik.

Dalam rangka mensejahterakan setiap pelaku ekonomi, termasuk masyarakat didalamnya, maka perubahan kebijakan ini perlu disertai dengan kompensasi melalui pemberdayaan komoditas berbasis kearifan lokal oleh pemerintah daerah. Peran pemerintah daerah efektif untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memberikan kontribusi terbesar untuk pendapatan daerah. Ini adalah langkah untuk menciptakan iklim yang kondusif untuk meningkatkan aksesibilitas secara ekonomi dan meningkatkan daya saing petani padi dalam menghadapi konsekuensi adanya liberalisasi perdagangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- AgroIndonesia. 2011. *HPP Molor Jadi Ajang Spekulasi*.  
<http://agroindonesia.co.id/2011/02/07/hpp-molor-jadi-ajang-spekulasi/>  
[Diakses pada tanggal 7 Maret 2011, pukul 10.51 WIB].
- BPS. 2011. *Panjang Jalan Dirinci Menurut Jenis Permukaan tahun 1987-2008 (Km)*.  
[http://www.bps.go.id/tab\\_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id\\_subyek=17&ntab=11](http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=17&ntab=11) [ Diakses pada tanggal 4 Maret 2011, pukul 22.06 WIB].
- BPS. 2011. *Panjang Jalan Dirinci Menurut Tingkat Kewenangan 1987-2008 (Km)*.  
[http://www.bps.go.id/tab\\_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id\\_subyek=17&ntab=10](http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=17&ntab=10) [ Diakses pada tanggal 4 Maret 2011, pukul 21.19 WIB].
- BPS. 2011. *Realisasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Menurut Jenis Penerimaan 2005-2009 (Ribu Rupiah)*.  
[http://www.bps.go.id/tab\\_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id\\_subyek=13&ntab=3](http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=13&ntab=3) [ Diakses pada tanggal 7 Maret 2011, pukul 10.00 WIB].
- BPS. 2011. *Tabel Luas Panen-Produktivitas-Produksi Tanaman Padi Seluruh Provinsi*. [http://www.bps.go.id/tmn\\_pgn.php?eng=0](http://www.bps.go.id/tmn_pgn.php?eng=0) [ Diakses pada tanggal 4 Maret 2011, pukul 22.34 WIB].
- Pemerintah Kabupaten Bima. 2011. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*.  
<http://bimakab.go.id/index.php?pilih=hal&id=31> [ Diakses pada tanggal 7 Maret 2011, pukul 10.53 WIB].

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Lampiran 1. Riwayat Hidup Peserta

1. Ketua Pelaksana Kegiatan
  - a. Nama Lengkap : Tia Anis Dhakhiyah
  - b. Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 31 Agustus 1990
  - c. Karya-Karya Ilmiah : 1. Artikel “Permasalahan Gula Kelapa di Indonesia”  
2. Esai “ Diversifikasi Tanaman Pangan Berbasis Kearifan Lokal sebagai Kompensasi atas Peningkatan Kesejahteraan Petani dalam Ketahanan Pangan Nasional”  
3. Karya Tulis “Waralaba Format Bisnis Pangan Segar menuju Globalisasi”
  - d. Penghargaan Ilmiah : 1. *English Speech Contest “Free Sex and Drugs”* se-Jabodetabek di UNISMA, Bekasi periode 2007  
2. Olimpiade Fisika se-Kabupaten Bogor, Cibinong periode 2007
2. Anggota Penulis 1
  - a. Nama Lengkap : Lutfiah Nur
  - b. Tempat, Tanggal Lahir : Bogor, 2 April 1991
  - c. Karya-Karya Ilmiah : -
  - d. Penghargaan Ilmiah : -
3. Anggota Penulis 2
  - a. Nama Lengkap : Akmi Retno Dwipa
  - b. Tempat, Tanggal Lahir : Bandar Lampung, 14 Februari 1992
  - c. Karya-Karya Ilmiah : Artikel “Pemanfaatan Lidah Buaya sebagai Pangan Sehat Kaya Serat”
  - d. Penghargaan Ilmiah : -





## Lampiran 1. Riwayat Hidup Peserta

1. Ketua Pelaksana Kegiatan
  - a. Nama Lengkap : Tia Anis Dhakhiyah
  - b. Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 31 Agustus 1990
  - c. Karya-Karya Ilmiah : 1. Artikel “Permasalahan Gula Kelapa di Indonesia”  
2. Esai “ Diversifikasi Tanaman Pangan Berbasis Kearifan Lokal sebagai Kompensasi atas Peningkatan Kesejahteraan Petani dalam Ketahanan Pangan Nasional”  
3. Karya Tulis “Waralaba Format Bisnis Pangan Segar menuju Globalisasi”
  - d. Penghargaan Ilmiah : 1. *English Speech Contest “Free Sex and Drugs”* se-Jabodetabek di UNISMA, Bekasi periode 2007  
2. Olimpiade Fisika se-Kabupaten Bogor, Cibinong periode 2007
2. Anggota Penulis 1
  - a. Nama Lengkap : Lutfiah Nur
  - b. Tempat, Tanggal Lahir : Bogor, 2 April 1991
  - c. Karya-Karya Ilmiah : -
  - d. Penghargaan Ilmiah : -
3. Anggota Penulis 2
  - a. Nama Lengkap : Akmi Retno Dwipa
  - b. Tempat, Tanggal Lahir : Bandar Lampung, 14 Februari 1992
  - c. Karya-Karya Ilmiah : Artikel “Pemanfaatan Lidah Buaya sebagai Panganan Sehat Kaya Serat”
  - d. Penghargaan Ilmiah : -

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan artikel atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.